

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian adalah perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2011 sampai tahun 2013. Penelitian hanya fokus pada perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam kurun waktu 3 tahun. Objek penelitian dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan menggunakan kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh penulis. Objek penelitian dipilih untuk perusahaan yang mengeluarkan laporan tahunan (*annual report*) di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam kurun waktu yang ditentukan. Laporan tahunan (*annual report*) perusahaan dipilih sebagai penelitian karena memberikan banyak informasi secara menyeluruh tentang perusahaan. Berdasarkan *purposive sampling* diperoleh sampel sebanyak 10 perbankan syariah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Daftar Nama Perbankan Syariah

No	Nama Perbankan Syariah
1	Bank BNI Syariah
2	Bank BRI Syariah
3	Bank BCA Syariah
4	Bank Mega Syariah
5	Bank Panin Syariah
6	Bank Bukopin Syariah
7	Bank Victoria Syariah
8	Bank Muamalat
9	Bank Syariah Mandiri
10	Bank Maybank Syariah

Sumber: data diolah, 2015.

1. Bank Mega Syariah

PT Bank Mega Syariah berawal dari PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu). Bank umum yang didirikan pada 14 Juli 1990 tersebut diakuisisi CT Corpora, dahulu bernama Para Group, melalui PT Para Global Investindo dan PT Para Rekan Investama pada 2001. Sejak awal, para pemegang saham memang ingin mengonversi bank umum konvensional itu menjadi bank umum syariah. Keinginan tersebut terlaksana ketika Bank Indonesia mengizinkan Bank Tugu dikonversi menjadi PT Bank Mega Syariah Indonesia (BSMI) pada 27 Juli 2004. Pengonversian tersebut dicatat dalam sejarah perbankan Indonesia sebagai upaya pertama pengonversian bank umum konvensional menjadi bank umum syariah.

Pada 25 Agustus 2004, BSMI resmi beroperasi. Hampir tiga tahun kemudian, 7 November 2007, pemegang saham memutuskan perubahan bentuk logo BSMI ke bentuk logo bank umum konvensional yang menjadi sister *company*-nya, yakni PT Bank Mega, Tbk., tetapi berbeda warna. Sejak 2 November 2010 sampai dengan sekarang, bank ini berganti nama menjadi PT Bank Mega Syariah.

Untuk mewujudkan visi “Bank Syariah Kebanggaan Bangsa”, Bank Mega Syariah telah menjadi bank devisa. Pemegang saham mayoritas memiliki komitmen dan tanggung jawab penuh untuk menjadikan Bank Mega Syariah sebagai bank umum syariah terbaik di industri perbankan syariah nasional. Komitmen tersebut dibuktikan dengan terus memperkuat modal bank.

Program tanggung jawab sosial Bank Mega Syariah disalurkan pada beberapa bidang, yaitu bidang pendidikan, bidang sosial kemasyarakatan, bidang kesehatan serta pemberdayaan umat.

2. Bank Muamalat Indonesia

Gagasan pendirian Bank Muamalat berawal dari lokakarya Bunga Bank dan Perbankan yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia pada 18-20 Agustus 1990 di Cisarua, Bogor. Ide ini berlanjut dalam Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia Realisasinya dilakukan pada 1 November 1991 yang ditandai dengan penandatanganan akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

Bank yang memiliki visi menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dan dikagumi di pasar rasional initelah memberikan layanan kepada 3,9 juta nasabah melalui 456 kantor layanan yang tersebar di 34 Provinsi di Indonesia dan didukung oleh jaringan layanan di lebih dari 4.000 *outlet System Online Payment Point (SOPP)* di PT. POS Indonesia dan 1.483 *Automated Teller Machine (ATM)*. Untuk memantapkan aksesibilitas nasabah. Bank Muamalat telah meluncurkan *Share Gold* yang dapat digunakan untuk bertransaksi bebas biaya di jutaan *merchant* di 170 negara. *Share Gold* meraih predikat sebagai kartu debit syariah berteknologi *chip* pertama di Indonesia oleh museum rekor indonesia (MURI).

Bank Muamalat Tbk, mempunyai komitmen bahwa keberadaannya sebagai entitas bisnis juga harus memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat dan lingkungan hidup disekitarnya, program tanggung jawab sosial yang dilakukan Bank Muamalat Tbk tercermin pada empat aspek, yaitu aspek lingkungan hidup, aspek pengembangan sosial masyarakat, aspek ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, dan aspek tanggung jawab terhadap konsumen.

3. Bank Syariah Mandiri

PT. Bank Syariah Mandiri didirikan pada tanggal 25 oktober 1999, dan baru mulai beroperasi pada senin tanggal 25 Rajab 1420 Hatau pada tanggal 1 November 1999 dengan modal dasar Rp 2.500.000.000.000. Pendirian bank ini sebagai tindak lanjut dari pemikiran pengembangan sistem ekonomi syariah, pemerintah memberlakukan UU No.10 tahun 1998 yang memberi peluang bagi bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*). Sebagai respon, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah, yang bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Melalui pendekatan *triple bottom lines* yang meliputi kinerja ekonomi (*economic indicators*), kinerja lingkungan (*environmental indicators*), dan kinerja sosial (*social indicators*), diharapkan keberadaan BSM tidak hanya bermanfaat bagi para pemegang saham (*shareholders*), tetapi juga kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang lebih luas yaitu nasabah/konsumen, masyarakat dan lingkungan. Bentuk tanggung jawab BSM terlihat pada 3 program yaitu mitra ummat (usaha mikro dan masyarakat mikro), didik umat (beasiswa, sarana dan prasarana) dan simpati ummat (kesehatan, kebencanaan dan lingkungan hidup).

4. Bank BNI Syariah

PT Bank BNI Tbk., membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) untuk merespons kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih tahan terhadap krisis ekonomi. Dimulai dengan lima kantor cabang yakni di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara, dan Banjarmasin.

Sesuai dengan Corporate Plan UUS BNI tahun 2000, pada 19 Juni 2010 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melakukan *spin off* atas UUS BNI dan meresmikan PT Bank BNI Syariah (“BNI Syariah atau Bank”) sebagai Bank Umum Syariah (BUS) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/41/KEP.GBI/2010. Realisasi ini tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selain itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

Bank BNI Syariah diresmikan dengan 27 kantor cabang dan 31 kantor cabang pembantu. Pada akhir Desember 2010 berhasil membukukan aset Rp6,4 triliun, naik 21% dari Juni 2010 dengan 27 kantor cabang dan 31 kantor cabang pembantu. Pada akhir Desember 2010 berhasil membukukan aset Rp6,4 triliun, naik 21% dari Juni 2010.

Dalam rangka mewujudkan salah satu misi Perusahaan yang terkait dengan usaha menciptakan suatu kondisi yang ramah lingkungan terhadap masyarakat sekitarnya, BNI Syariah secara berkelanjutan dan sistematis menerapkan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang terfokus pada tiga bidang yaitu pendidikan, sosial kemasyarakatan dan lingkungan hidup.

5. Bank BCA Syariah

Untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan layanan syariah, maka berdasarkan akta akuisisi no 72 tanggal 12 juni 2009 PT. Bank Central Asia, Tbk

(BCA) mengakuisisi PT. Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB) yang nantinya menjadi PT. Bank BCA Syariah.

Perubahan kegiatan usaha Bank dari bank konvensional menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur BI pada tanggal 2 Maret 2009, dengan memperoleh izin tersebut Bank BCA Syariah resmi beroperasi pada tanggal 5 April 2010 sebagai bank umum syariah.

BCA syariah mencanangkan untuk menjadi pelopor dalam industri perbankan syariah Indonesia sebagai bank yang unggul dibidang penyelesaian pembayaran, penghimpunan dana dan pembiayaan bagi nasabah, dalam hal ini BCA syariah telah memiliki 45 jaringan cabang yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia.

Terkait dengan kegiatan tanggung jawab sosial yang telah dilakukan oleh BCASyariah terfokus pada tiga bidang yaitu bidang pendidikan melalui program beasiswa yang diberikan, bidang kesehatan, dan bidang kesejahteraan sosial melalui program bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu.

6. Bank BRI Syariah

Sejarah BRISyariah berawal pada tanggal 19 Desember 2007 saat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., mengakuisisi Bank Jasa Arta. Setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2008 melalui surat No: 10/67/KEP.GBI/ DpG/2008, PT Bank BRISyariah kemudian secara resmi menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip Syariah pada tanggal 17 November 2008. Setelah sebelumnya sempat menjalankan kegiatan usaha bank

secara konvensional. Kegiatan usaha BRISyariah semakin kokoh setelah ditandatangani Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., untuk melebur ke dalam PT Bank BRI Syariah (proses *spin off*) pada tanggal 19 Desember 2008 yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan yang bernilai strategis sebagai bentuk dukungan nyata induk perusahaan kepada kegiatan operasional Bank BRI Syariah.

Bank Syariah yang memiliki komitmen untuk memberikan teladan menuju perusahaan perbankan syariah yang terbaik, unggul sehat, menguntungkan serta mampu memberikan manfaat kepada seluruh pemangku kepentingannya ini memiliki beberapa program terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab sosialnya, yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dakwah dan pembangunan sarana ibadah, sarana publik dan lingkungan hidup serta bantuan untuk korban bencana alam.

7. Bank Panin Syariah

Panin Bank Syariah merupakan salah satu anak perusahaan Panin Bank, bank umum peringkat ke-6 terbesar di Indonesia yang telah beroperasi selama lebih dari empat dasa warsa dalam melayani masyarakat Indonesia. Panin Bank Syariah adalah salah satu lembaga perbankan syariah terkemuka di Indonesia yang resmi beroperasi di penghujung tahun 2009. Total aset Panin Bank Syariah mencapai Rp4,05 triliun per Desember 2013, jumlah pembiayaan sebesar Rp2,59 triliun, sedangkan dana pihak ketiga Rp2,87 triliun. Laba sebelum pajak di tahun 2013 mencapai Rp29,16 miliar, dengan rasio BOPO 81,31% dan CAR 20,83%. Per 31 Desember 2013 PaninBank Syariah memiliki 10 kantor cabang yang tersebar di

Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang dan Sidoarjo.

Sampai dengan tahun 2013, modal disetor Panin Bank Syariah sebesar Rp500 miliar, sehingga kedepannya memberi keleluasaan untuk melakukan ekspansi usaha. Sejak tahun 2012, Panin Bank Syariah telah bekerja sama dengan Panin Bank di bidang jaringan ATM, sehingga nasabah giro dan tabungan Panin Bank Syariah dapat melakukan transaksi di lebih dari 800 jaringan ATM Panin Bank yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Salah satu visi yang dimiliki Panin Bank Syariah adalah menjalin hubungan muamalah yang saling menguntungkan dan profesional dengan seluruh *stakeholder*, perwujudan dari misi tersebut terlihat pada dua aspek program tanggung jawab sosialnya yang meliputi pendidikan, sosial kemasyarakatan.

8. Bank Bukopin Syariah

Bank Syariah Bukopin (selanjutnya disebut Perseroan) didirikan pada tahun 1990 dengan modal dasar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah). Dalam perkembangannya, atas dasar pertimbangan bisnis pada akhir tahun 2002, Muhammadiyah, salah satu organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia, mengakuisisi PT Bank Swansarindo International yang selanjutnya, PT Bank Swansarindo International berubah nama menjadi PT Bank Persyarikatan Indonesia.

Untuk mengembangkan bisnis perusahaan, selama 2005-2008 PT Bank Bukopin, Tbk., terlibat dalam asistensi kegiatan operasional PT Bank Persyarikatan Indonesia. Tambahan modal juga diberikan PT Bank Bukopin, Tbk., untuk memperkuat bisnis PT Bank Persyarikatan Indonesia. Setelah beberapa tahun di bawah asistensi PT Bank Bukopin, Tbk. dan melihat peluang bisnis di perbankan syariah, PT Bank Persyarikatan Indonesia mengubah arah bisnisnya dari bank

konvensional menjadi bank syariah. Izin usaha berdasarkan prinsip syariah pun diperoleh dari BI yang dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur BI Nomor 10/69/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 27 Oktober 2008. Atas dasar surat keputusan tersebut, nama PT Bank Persyarikatan Indonesia berubah menjadi PT Bank Syariah Bukopin. Secara resmi Perseroan melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah pada Selasa, 11 Zulhijah 1430 H atau 9 Desember 2008.

Untuk menjaga keberlanjutan bisnisnya Bank Syariah Bukopin melakukan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang tercermin dalam 3 program yaitu pendidikan, sosial, bantuan bencana, dan bantuan kegiatan keagamaan, seperti penyelenggaraan kegiatan ramadhan.

9. Maybank Syariah

Tonggak sejarah pendirian PT Bank Maybank Syariah Indonesia (Maybank Syariah) berawal pada Januari 1995 yaitu beroperasinya bank *joint venture* Indonesia-Malaysia pertama, PT Bank Maybank Indocorp, yang menawarkan beragam jasa perbankan konvensional termasuk pembiayaan skala besar untuk nasabah korporasi serta komersial.

Tahun 2010 menjadi saksi perubahan entitas PT Bank Maybank Indocorp menjadi bank syariah komersial dan berganti nama menjadi PT Bank Maybank Syariah Indonesia (Maybank Syariah).

Berdasarkan persetujuan Bank Indonesia tertanggal 23 September 2010, Maybank Syariah memulai kegiatan usaha sebagai bank syariah pada tanggal 1 Oktober 2010. Pemegang saham PT Bank Maybank Syariah Indonesia adalah Malayan Banking Berhad (99%) dan PT Prosperindo (1%).

Bank yang memiliki visi menjadi bank korporasi yang bereputasi sangat baik di Indonesia ini, bertekad untuk menjadi perusahaan terkemuka dan terpilih di khsanah keuangan syariah di Indonesia dan regional. Fokus strategi bisnis Bank meliputi *corporate banking* serta jasa konsultasi keuangan.

Misi utama PT. Bank Maybank Syariah yaitu membangun hubungan berkesinambungan melalui penciptaan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan misi tersebut dapat tercermin dari kegiatan perusahaan yang dilaksanakan dalam pendidikan, sosial kemasyarakatan.

10. Bank Victoria Syariah

PT Bank Victoria Syariah berawal dari PT Bank Swaguna berdiri di Cirebon sejak tahun 1967. Pada tahun 2007 diakuisisi oleh PT Bank Victoria International, Tbk dan dikonversi menjadi Bank Umum Syariah dengan izin operasional dari Bank Indonesia (BI) dengan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No12/8/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 10 Februari 2010 dan efektif sejak tanggal 1 April 2010.

Selaras dengan visi yang dimilikinya, Bank Victoria Syariah telah berkembang menjadi entitas bisnis syariah yang memberikan beragam solusi finansial kepada nasabah. Strategi pengembangan bisnis bank akan diarahkan pada segmen mikro dan UMKM yang memiliki peluang pasar yang sangat besar dan akan terus berkembang.

Perwujudan tanggung jawab sosial Bank Victoria Syariah dilakukan dengan melibatkan BAZNAS dan dilakukan sendiri yang tercermin dalam 2 program yaitu sosial kemasyarakatan dan disalurkan ke baznas.

4.2 Analisis Deskriptif

4.2.1 Persiapan Data

4.2.1.1 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan mengidentifikasi besar kecilnya suatu perusahaan, ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset pada laporan keuangan yang diterbitkan oleh perbankan syariah. Berikut daftar total aset yang dimiliki oleh perbankan syariah selama tahun 2011-2013.

Tabel 4.2
Daftar Total Aset Perbankan Syariah

Nama Perbankan Syariah	Tahun		
	2011	2012	2013
Bank BNI Syariah	Rp. 8.466.887.000.000	Rp.10.645.313.000.000	Rp.14.708.405.000.000
Bank BRI Syariah	Rp.11.200.823.000.000	Rp.14.008.914.000.000	Rp.17.400.914.000.000
Bank BCA Syariah	Rp.1.217.100.000.000	Rp. 1.602.200.000.000	Rp. 2.041.400.000.000
Bank Mega Syariah	Rp. 5.564.662.000.000	Rp. 8.163.668.000.000	Rp. 9.121.576.000.000
Bank Panin Syariah	Rp. 1.018.681.000.000	Rp. 2.140.482.000.000	Rp. 4.052.701.000.000
Bank Bukopin Syariah	Rp. 2.730.027.000.000	RP. 3.166.108.000.000	Rp. 4.343.069.000.000
Bank Victoria Syariah	Rp. 642.026.000.000	Rp. 939.472.000.000	Rp. 1. 324.384.000.000
Bank Muamalat	Rp.34.479.510.000.000	Rp.44.854.410.000.000	Rp.54.694.020.000.000
Bank Syariah Mandiri	Rp.48.672.000.000.000	Rp.54.229.000.000.000	Rp.63.695.000.000.000
Bank Maybank Syariah	Rp. 1.692.959.000.000	Rp. 2.062.552.000.000	Rp. 2.299.971.000.000

Sumber: *Annual Report*, data diolah 2015

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa ukuran perusahaan yang dilihat dari total nilai aset perbankan syariah, perbankan syariah terbesar selama tahun 2011-2013 adalah Bank Syariah Mandiri dan ukuran perusahaan terkecil adalah Bank Victoria Syariah.

4.2.1.2 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan salah satu ukuran kinerja keuangan perusahaan yang menunjukkan kemampuan dari perusahaan dalam menghasilkan laba. Dalam penelitian ini profitabilitas diproksikan dengan *return on Equity* (ROE). Perolehan nilai ROE dalam penelitian ini diambil dari nilai rasio keuangan yang terdapat di laporan tahunan masing-masing perbankan syariah.

4.2.1.3 Leverage

Leverage merupakan kemampuan perusahaan atas proporsi penggunaan hutang dalam membiayai investasi. Tingkat *leverage* pada penelitian ini diukur dengan *debt to equity ratio* (DER). *Debt to equity ratio* merupakan proporsi total hutang terhadap total ekuitas.

$$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Sebagai contoh, total hutang Bank BNI Syariah pada tahun 2013 sebesar Rp. 3.838.672.000.000 dan total ekuitas Bank BNI Syariah pada tahun 2013 sebesar Rp. 1.304.680.000.000, maka besarnya *leverage* Bank BNI Syariah adalah:

$$DER = \frac{\text{Rp. 3.838.672.000.000}}{\text{Rp. 1.304.680.000.000}}$$

$$= 2.9422 * 100$$

$$= 294,22 \%$$

Dari perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa sebesar 294,22% ekuitas perusahaan dibiayai oleh hutang.

4.2.1.4 Ukuran Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan tingkat jabatan tertinggi dalam perusahaan.

Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah dewan komisaris yang terdapat dalam perbankan syariah, yang dapat dilihat dari laporan tahunan yang di terbitkan oleh perbankan syariah.

4.2.1.5 Ukuran Dewan Pengawas Syariah

Dewan pengawas syariah memiliki tugas untuk mengawasi kegiatan operasional perbankan agar sesuai dengan ketentuan syariat islam. Ukuran dewan pengawas syariah dapat dilihat dari total dewan pengawas syariah yang dimiliki oleh perbankan syariah yang dapat dilihat laporan tahunan yang di terbitkan oleh perbankan syariah.

4.2.2 Data Total

Dalam penelitian ini, data yang digunakan sebanyak 30 data. Data tersebut diperoleh dari 10 objek penelitian selama 3 tahun berturut-turut mulai dari tahun 2011-2013.

Tabel 4.3
Daftar Data Penelitan Tahun 2011

Nama Perbankan Syariah	ISR	SIZE	ROE	DER	UDK	UDPS
Bank BNI Syariah	58,1%	29,77	6,63%	121%	3	2
Bank BRI Syariah	51,2%	30,05	1,19%	231%	5	2
Bank BCA Syariah	48,8%	27,38	2,3%	55%	3	2
Bank Mega Syariah	48,8%	29,35	16,89%	418%	3	3
Bank Panin Syariah	30,2%	27,65	3,31%	6%	3	2
Bank Bukopin Syariah	55,8%	28,64	6,19%	967%	3	2
Bank Victoria Syariah	44,2%	27,19	18,69%	45%	3	2
Bank Muamalat Syariah	72,1%	31,11	20,79%	207%	6	3
Bank Mandiri Syariah	60,5%	31,52	24,24%	229%	5	3
Bank Maybank Syariah	44,2%	28,16	4,92%	67%	3	2

Sumber: *Annual Report*, lampiran 1, data diolah 2015

Tabel 4.4
Daftar Data Penelitian Tahun 2012

Nama Perbankan Syariah	ISR	SIZE	ROE	DER	UDK	UDPS
Bank BNI Syariah	69,8%	30,00	10,18%	184%	3	2
Bank BRI Syariah	67,4%	30,28	10,41%	321%	5	2
Bank BCA Syariah	51,2%	28,10	2,8%	84%	3	2
Bank Mega Syariah	48,8%	29,73	57,98%	341%	3	3
Bank Panin Syariah	39,5%	28,39	8,20%	43%	3	2
Bank Bukopin Syariah	58,1%	28,93	7,32%	1224%	3	2
Bank Victoria Syariah	44,2%	27,57	8,93%	106%	3	2
Bank Muamalat Syariah	72,1%	31,62	29,16%	330%	6	3
Bank Mandiri Syariah	58,1%	31,62	25,05%	219%	5	3
Bank Maybank Syariah	46,5%	28,35	4,93%	57%	2	2

Sumber: *Annual Report*, lampiran 1, data diolah 2015

Tabel 4.5
Daftar Data Penelitian Tahun 2013

Nama Perbankan Syariah	ISR	SIZE	ROE	DER	UDK	UDPS
Bank BNI Syariah	79,1%	30,32	11,73%	294%	3	2
Bank BRI Syariah	67,4%	30,49	10,20%	265%	5	2
Bank BCA Syariah	55,8%	28,34	4,30%	88%	3	2
Bank Mega Syariah	51,2%	28,46	26,23%	247%	3	3
Bank Panin Syariah	65,1%	29,03	4,44%	77%	3	2
Bank Bukopin Syariah	58,1%	29,10	7,63%	1384%	3	2
Bank Victoria Syariah	46,5%	27,91	3,70%	120%	3	2
Bank Muamalat Syariah	69,8%	31,63	32,87%	230%	6	3
Bank Mandiri Syariah	58,1%	31,79	15,37%	227%	5	3
Bank Maybank Syariah	48,8%	28,46	5,05%	33%	2	2

Sumber: *Annual Report*, lampiran 1, data diolah 2015

4.2.2 Hasil Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan suatu analisis yang bertujuan untuk memberikan informasi umum mengenai data dari sampel penelitian yang digunakan. Informasi umum mengenai data penelitian ini menggunakan *mean*, nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi.

Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan mengenai pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, ukuran dewan komisaris dan ukuran dewan

pengawas syariah terhadap pengungkapan *islamic social reporting* dengan menggunakan bantuan program *microsoft office excel 2007* dan program *spss* versi 16.

Variabel penelitian ini adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, ukuran dewan komisaris, dan ukuran dewan pengawas syariah. Berikut hasil uji deskriptif variabel penelitian yang berupa nilai *mean*, nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi.

Tabel 4.6
Hasil Analisis Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.Deviation
Ukuran Perusahaan (<i>size</i>)	30	27.19	31.79	29.4898	1.45756
Profitabilitas (ROE)	30	1.19	57.98	13.0533	12.2221
<i>Leverage</i> (DER)	30	6	1384	274	333.678
Ukuran Dewan Komisaris (UDK)	30	2	6	3.63	1.189
Ukuran Dewan Pengawas Syariah (UDPS)	30	2	3	2.30	.466
ISR	30	30.20	79.10	56.5033	11.84982
Valid N (listwise)	30				

Sumber :*Annual Report*, lampiran 2, data diolah 2015

Tabel 4.6 menggambarkan deskripsi variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Minimum adalah nilai terkecil dari suatu rangkaian pengamatan, maksimum adalah nilai terbesar dari suatu rangkaian pengamatan, *mean* adalah hasil penjumlahan nilai seluruh data dibagi dengan banyaknya data penelitian, sedangkan standar deviasi adalah akar dari jumlah kuadrat dari selisih nilai data dengan rata-rata dibagi dengan banyaknya data.

Variabel ukuran perusahaan (*size*) diukur dengan total aset memiliki nilai rata-rata 29,4, nilai maximum sebesar 31,79 atau sekitar 63,695 miliar dan nilai minimum sebesar 27,19 atau sekitar 642,026 juta. Masing-masing perusahaan

dengan nilai asset tertinggi adalah PT Bank Syariah Mandiri, Tbk., dan nilai asset terendah adalah PT Bank Victoria, Tbk.

Variabel *profitabilitas* (ROE) memiliki nilai rata-rata 13,05%. Nilai maximum sebesar 58% artinya bahwa perusahaan dapat menghasilkan laba bersih hingga 58 % dari seluruh nilai ekuitas perusahaan. Perusahaan yang memiliki kemampuan tersebut adalah PT Bank Muamalat,. Nilai minimum sebesar 1.19% artinya bahwa perusahaan dapat menghasilkan laba paling sedikit sebesar 1.19% dari seluruh nilai ekuitas perusahaan. Perusahaan yang memiliki kemampuan menghasilkan laba bersih minimal adalah PT Bank BCA Syariah, Tbk.

Variabel *leverage* (DER) memiliki nilai rata-rata 274%. Hal ini berarti bahwa perusahaan sampel rata-rata memiliki hutang sebesar 274% dari total ekuitas perusahaan. Nilai maximum sebesar 1384% dari total ekuitas perusahaan. Nilai minimum sebesar 6% dari total ekuitas perusahaan yang dimiliki masing-masing oleh PT Bukopin Syariah, Tbk dan PT Bank Panin Syariah, Tbk.

Variabel ukuran dewan komisaris (UDK) memiliki nilai rata-rata 3,63. Hal ini menunjukkan rata-rata perusahaan sampel berjumlah 3 orang. Nilai maximum sebesar 6 atau 6 orang dewan komisaris dimiliki oleh PT Bank Muamalat, Tbk. Nilai minimum sebesar 2 orang dewan komisaris yang dimiliki oleh PT Maybank Syariah, Tbk.

Variabel ukuran dewan pengawas syariah (UDPS) memiliki nilai rata-rata 2,30. Hal ini menunjukkan rata-rata perusahaan sampel memiliki dewan pengawas syariah berjumlah 2 orang. Nilai maximum sebesar 3 orang dewan pengawas syariah dimiliki oleh PT. Bank Mega Syariah, PT. Bank Muamalat, Tbk dan PT. Bank Syariah Mandiri. Nilai minimum sebesar 2 orang dewan pengawas syariah yang

dimiliki oleh PT. BNI Syariah, PT. BRI Syariah, PT. BCA Syariah, PT. Bank Panin Syariah, PT. Bank Bukopin Syariah, PT. Bank Victoria Syariah, dan PT. Bank Maybank Syariah.

Nilai indeks pengungkapan *islamic social reporting* (ISR) sebesar 56,5 %. Hal ini berarti bahwa rata-rata perusahaan sampel mengungkapkan *islamic social reporting* dalam *annual report* perusahaan sebesar 56% atau sekitar 24 item dari jumlah 43 item yang diukur. Nilai maximum pengungkapan *islamic social reporting* dalam *annual report* perusahaan sampel sebesar 79,1%. Perusahaan yang memiliki pengungkapan maksimal adalah PT. Bank BNI Syariah, Tbk. Nilai minimum pengungkapan *islamic social reporting* dalam *annual report* perusahaan sampel sebesar 30%. Perusahaan yang memiliki pengungkapan minimal adalah PT. Panin Bank Syariah.

4.3 Analisis Data

4.3.1 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan koefisien regresi terbaik, linier dan tidak bias atas *Ordinary Least Square* (OLS). Sebelum dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi berganda perlu terlebih dahulu pengujian asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri dari:

4.3.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah residual model regresi yang diteliti mempunyai distribusi normal atau tidak. Metode yang digunakan untuk menguji normalitas adalah dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai signifikansi dari hasil uji Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05, maka asumsi normalitas terpenuhi.

Hasil penelitian untuk uji normalitas dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.7
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^a	Mean	.0000
	Std. Deviation	6.159111
Most Extreme Differences	Absolute	.074
	Positive	.050
	Negative	-.074
Kolmogorov-Smirnov Z		.407
Asymp. Sig. (2-tailed)		.996

Sumber: *Annual Report*, lampiran 2, data diolah 2015

Hasil pengujian data penelitian dengan hasil yang ditunjukkan dalam tabel 4.7 di atas, diketahui besarnya *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0,996 yang mempunyai nilai diatas tingkat signifikansi 0,05 maka asumsi normalitas terpenuhi.

4.3.1.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji keterkaitan antar variabel independen. Salah satu model regresi linear yang baik adalah tidak terjadi korelasi antar variabel independen.

Adanya multikolinearitas sempurna akan berakibat koefisien regresi tidak dapat ditentukan serta standar deviasi akan menjadi tidak terhingga. Jika multikolinearitas kurang sempurna, maka koefisien regresi meskipun berhingga akan mempunyai standar deviasi yang besar yang berarti pula koefisien-koefisiennya tidak dapat ditaksir dengan mudah.

Uji multikolinearitas dapat di lihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Pedoman yang dipakai adalah nilai *tolerance* 0,10 atau sama dengan nilai VIF di atas 10 sehingga data yang tidak terkena multikolinearitas nilai toleransinya harus lebih dari 0,10 atau VIF kurang dari 10.

Tabel 4.8
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel Idependen	Tolerance	VIF
Ukuran Perusahaan	.256	3.924
Profitabilitas	.36	2.769
<i>Leverage</i>	.949	1.054
Ukuran Dewan Komisaris	.345	2.895
Ukuran Dewan Pengawas Syariah	.246	4.064

Sumber :*Annual Report*, lampiran 2, data diolah 2015

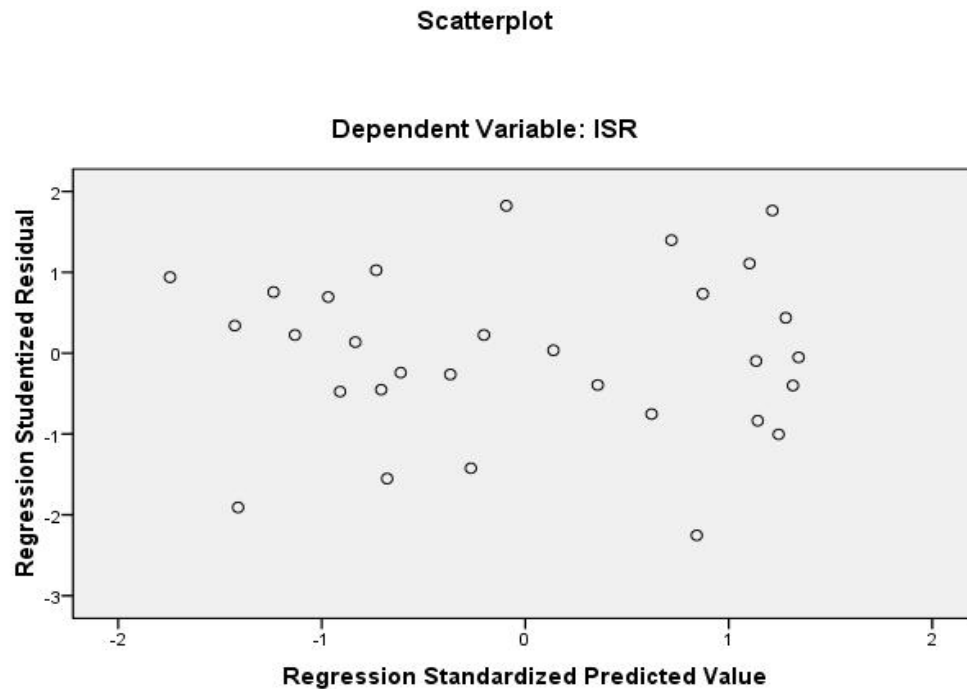
Hasil pengujian perhitungan VIF menunjukkan bahwa dari empat variabel di atas tidak menunjukkan nilai VIF di atas 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi tersebut.

4.3.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui adanya ketidaksamaan varians dari residual antara suatu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Jika varians dari residual antara satu pengamatan dengan pengamatan lain berbeda disebut heteroskedastisitas. Model yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas, artinya varians dari residual antara pengamatan yang satu dengan yang lain tidak terjadi perbedaan atau homoskedastisitas.

Heteroskedastitas diuji dengan menggunakan uji *scatterplot*, yaitu dengan melihat titik penyebaran dari plot yang telah dihasilkan. Jika titik penyebaran dari plot yang dihasilkan menyebar atau tidak menghasilkan suatu pola tertentu, maka dinyatakan tidak mengalami heteroskedastisitas (homoskedastisitas).

Gambar 4.1



Sumber: *Annual Report*, lampiran 2, data diolah 2015

Dari Gambar di atas diketahui titik-titik residual menyebar secara acak. Dengan demikian residual dinyatakan menyebar normal dan tidak mengalami heteroskedastisitas.

4.3.1.4 Uji Autokorelasi

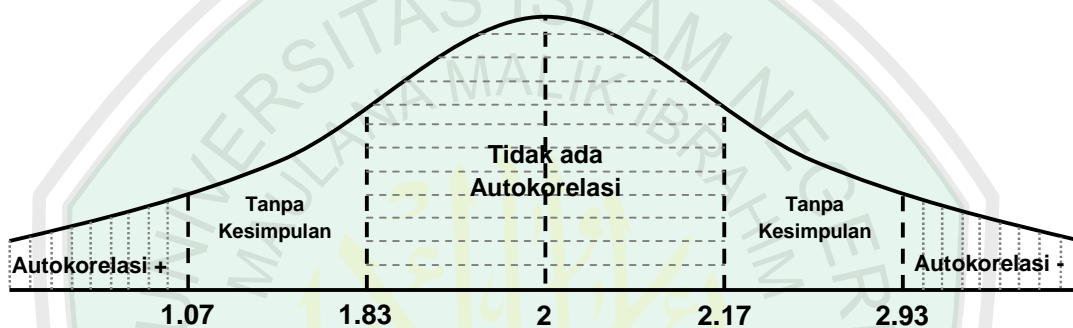
Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Uji autokorelasi dilakukan dengan menghitung nilai Durbin Watson d test. Jumlah variabel 5 dan jumlah sampel yang digunakan (n) sebanyak 30, diperoleh nilai D_u 1.83 sebesar dan D_l sebesar 1,07.

Tabel 4.9
Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.584 ^a	.730	.674	6.77035	1.504

Sumber : *Annual Report*, lampiran 2, data diolah 2015

Gambar 4.2
Kurva Durbin-Watson



Tabel 4.10
Tabel Durbin Watson

Kriteria DW		Keterangan
$< dL$	$< 1,07$	Ada Autokorelasi
$dL - dU$	$1,07 - 1,83$	Tidak ada kesimpulan
$dU - (4-dU)$	$1,83 - 2,17$	Tidak ada Autokorelasi
$(4-dU) - (4-dL)$	$2,17 - 2,93$	Tidak ada kesimpulan
$> (4-dU)$	$> 2,17$	Ada Autokorelasi

Sumber: Suliyanto, 2011

Hasil durbin watson (DW) dari uji autokorelasi menunjukkan nilai 1.504 karena nilai dw berada diantara nilai D_L dan D_U , yaitu $1.07 < 1.504 < 1.83$, sehingga tidak mempunyai keputusan. Oleh karena data penelitian dengan data panel masing-masing mempunyai periode yang berbeda maka dapat ditarik kesimpulan tidak terjadi adanya autokorelasi.

4.4 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda adalah analisis yang digunakan untuk menguji hubungan antar variabel-variabel independen ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, ukuran dewan komisaris, dan ukuran dewan pengawas syariah terhadap variabel dependen pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Analisis regresi akan dikembangkan sebuah *estimating equation* (persamaan regresi) yaitu suatu formula matematika yang mencari nilai variabel dependen dari nilai variabel independen yang diketahui (CILCT FE). Hasil analisis regresi dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% diperoleh persamaan sebagai berikut:

Tabel 4.11
Hasil Uji Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-194.836	44.583		-4.370	.000
Ukuran Perusahaan (<i>size</i>)	9.470	1.800	1.106	5.262	.000
Profitabilitas (ROE)	.057	.171	.059	.332	.742
<i>Leverage</i> (DER)	.003	.004	.080	.734	.470
Dewan Komisaris (UDK)	-.201	1.800	-.020	-.112	.912
Dewan Pengawas Syariah (UDPS)	-12.190	5.438	-.479	-2.242	.034

Sumber :*Annual Report*, lampiran 2, data diolah 2015

Analisis linier berganda digunakan untuk mendapat koefisien regresi yang akan menentukan apakah hipotesis yang dibuat akan diterima atau ditolak. Berdasarkan tabel di atas dengan signifikansi 5% diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$ISR = -194.836 + 9.470size + .057ROE + .003DER - .201UDK - 12.190UDPS$$

Dari persamaan tersebut dapat diketahui bahwa, jika semua variabel independen bernilai konstan maka pengungkapan ISR akan berkurang sebesar -194.836, dan setiap adanya peningkatan 1 juta *size* akan meningkatkan pengungkapan ISR sebesar 9,470, setiap adanya peningkatan 1 % ROE akan meningkatkan pengungkapan ISR sebesar 0,057, setiap peningkatan 1% DER akan meningkatkan pengungkapan ISR sebesar 0,003, setiap penambahan 1 orang dewan komisaris akan mengurangi pengungkapan ISR sebesar -0.201 sedangkan setiap penambahan 1 orang dewan pengawas syariah akan mengurangi tingkat pengungkapan ISR sebesar -12.19.

Tabel 4.12
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.854 ^a	.730	.674	6.77035

Sumber : *Annual Report*, lampiran 2, data diolah 2015

Nilai adjusted r square menunjukkan kontribusi ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, ukuran dewan komisaris, dan ukuran dewan pengawas syariah secara bersama-sama mempengaruhi pengungkapan *islamic social reporting* perbankan syariah sebesar 67,4 %, sedangkan sisanya sebesar 32,6% merupakan kontribusi peubah lain yang tidak termasuk dalam model penelitian.

4.5.5 Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan digunakan untuk menguji apakah secara bersama-sama variabel independen ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, ukuran dewan komisaris, dan ukuran dewan pengawas syariah mempunyai pengaruh terhadap variabel

dependen pengungkapan *islamic social reporting*. Hasil uji F diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.13
Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2972.025	5	594.405	12.968	.000 ^a
	Residual	1100.105	24	45.838		
	Total	4072.130	29			

Sumber : *Annual Report*, lampiran 2, data diolah 2015

Hasil pengelolaan data yang ditunjukkan dalam tabel 4.13 dapat dilihat bahwa nilai F hitung 12,968 dengan signifikansi F sebesar 0,000 sedangkan F tabel pada taraf kepercayaan 95% (0,05) adalah 2,73 yang berarti $F_{hitung} > F_{tabel}$. Nilai sig. untuk $F < 5\%$ ($0,00 < 0,05$) Artinya bahwa secara simultan atau bersama-sama variabel independen yakni ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, ukuran dewan komisaris, dan ukuran dewan pengawas syariah, berpengaruh signifikan terhadap variabel independen yakni pengungkapan *islamic social reporting* yang diukur dengan *indeks* pengungkapan *islamic social reporting*. Hal ini berarti ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, ukuran dewan komisaris, dan ukuran dewan pengawas syariah, secara bersama-sama akan meningkatkan pengungkapan *islamic social reporting* pada perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

4.6 Pembahasan

4.6.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*

Hasil pengujian untuk variabel independen ukuran perusahaan menunjukkan

bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan *islamic social reporting* perbankan syariah. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2013), Raditya (2012) dan Putri (2014) yang menyebutkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan *islamic social reporting*. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh firmansyah (2013) dan Maulida (2013) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh secara signifikan antara ukuran perusahaan dengan pengungkapan *islamic social reporting*.

Ukuran dari suatu perusahaan dapat dilihat dari nilai total aset yang dimiliki perusahaan. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan harus dilakukan agar keberlanjutan usaha suatu perusahaan tetap terjaga. Menurut Hasibuan (2001) dalam Purnasiwi (2011:32) menyatakan secara umum perusahaan besar akan mengungkapkan informasi lebih banyak dari pada perusahaan kecil. Hal ini karena perusahaan besar akan menghadapi resiko politis yang lebih besar dibanding perusahaan kecil. Secara teoritis perusahaan besar tidak akan lepas dari tekanan politis, yaitu tekanan untuk melakukan pertanggungjawaban sosial. Pengungkapan sosial yang lebih besar merupakan pengurangan biaya politis bagi perusahaan

4.6.2 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*

Hasil pengujian untuk hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *islamic social reporting*. Hal ini terlihat pada hasil uji t pada output spss yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.742 nilai ini lebih besar dari 0.05 sehingga dinilai tidak signifikan atau

menunjukkan tidak adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Artinya besar kecilnya ROE suatu perbankan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perbankan. Hasil pengujian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri (2014) yang menyebutkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan ISR di Indonesia. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani (2013), Raditya (2012) dan Widiawati (2012).

Profitabilitas yang diukur dengan ROE merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba, perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi akan memberikan pengungkapan yang lebih banyak untuk meyakinkan pihak eksternal bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik, namun hal ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, dimana hal ini sesuai dengan Sefrilia (2012) dalam Firmansyah (2013) yang menyatakan bahwa *political visibility* perusahaan tergantung pada ukuran (*size*), bukan pada kemampuannya menghasilkan laba (profitabilitas). Artinya besar kecilnya pengungkapan tidak ditentukan oleh besar kecilnya profitabilitas.

Konsep bisnis dalam Islam juga menerapkan prinsip transparansi, artinya dalam berbisnis tidak ada sesuatu yang disembunyikan, dengan tidak berpengaruhnya variabel profitabilitas hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pengungkapan *islamic social reporting* yang dilakukan oleh perbankan syariah didasari oleh kepatuhan perbankan pada konsep bisnis Islami bukan terletak pada besar kecilnya profit yang dihasilkan perbankan syariah.

4.6.3 Pengaruh *Leverage* Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan *islamic social reporting*. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah (2013), Widayuni (2014) dan Masruki (2011) yang menunjukkan tidak adanya pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan *islamic social reporting*. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Purnasiwi (2011) yang menunjukkan hasil sebaliknya.

Menurut Scott (2000) menyampaikan pendapat yang mengatakan bahwa semakin tinggi *leverage* kemungkinan besar perusahaan akan mengalami pelanggaran terhadap kontrak utang, maka manajer akan berusaha untuk melaporkan laba sekarang lebih tinggi dibandingkan laba dimasa depan. Perusahaan yang memiliki rasio *leverage* tinggi akan lebih sedikit mengungkapkan CSR supaya dapat melaporkan laba sekarang yang lebih tinggi.

Terdapat hubungan negatif antara pengungkapan sosial dengan tingkat *financial leverage*, hal ini berarti semakin tinggi rasio utang/modal semakin rendah pengungkapan sosialnya karena semakin tinggi tingkat *leverage* maka semakin besar kemungkinan perusahaan akan melanggar perjanjian kredit. Sehingga perusahaan harus menyajikan laba yang lebih tinggi pada saat sekarang dibandingkan laba di masa depan. Supaya perusahaan dapat menyajikan laba yang lebih tinggi, maka perusahaan harus mengurangi biaya-biaya termasuk biaya-biaya untuk mengungkapkan informasi sosial. [Belkaoui (1989) dalam Marina (2009)]

4.6.4 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*

Dewan komisaris merupakan tingkat jabatan tertinggi dalam perusahaan yang

biasanya terdiri dari dewan komisaris utama, komisaris dan dewan komisaris independen. Dengan adanya jumlah anggota dewan komisaris yang besar, dimungkinkan ada banyak saran yang masuk di jajaran direksi dan akan mempengaruhi keputusan yang diambil oleh direksi. Namun bukan hanya hal itu yang menjadi alasannya, independensi seorang komisaris juga menentukan dalam pengungkapan *islamic social reporting*.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan *islamic social reporting*. Hal ini terlihat dengan hasil output spss yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.912 yang lebih besar dari 0.05 yang menunjukkan tidak adanya pengaruh. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Puji (2013) yang menunjukkan tidak adanya pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan *islamic social reporting*. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Khoirudin(2013) yang menunjukkan adanya pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan *islamic social reporting*.

Menurut Firmansyah (2013: 126), tidak adanya pengaruh antara ukuran dewan komisaris dengan pengungkapan *islamic social reporting* perbankan syariah disebabkan karena keberadaan dewan komisaris pada bank syariah hanya bekerja pada pengawasan kinerja keuangan, atau bagaimana mengawasi perusahaan agar berjalan sebagaimana perusahaan pada umumnya yaitu memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

4.6.5 Pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*

Secara garis besar Dewan Pengawas Syariah (DPS) melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) serta memberikan nasihat dan saran kepada Direksi terkait dengan pelaksanaan kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Sebagai pejabat yang berwenang untuk memberikan nasehat dan saran kepada direksi, serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah, DPS ikut berperan dalam menentukan pengungkapan ISR perbankan syariah. Hal ini karena DPS mempunyai tugas mengawasi terhadap kegiatan perbankan syariah yang dipimpin, termasuk dalam hal ini mengawasi kegiatan kegiatan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah dan kegiatan sosial lainnya, dimana hal tersebut dapat diakui sebagai bentuk ISR perusahaan.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan *islamic social reporting*. Hasil pengujian ini sesuai dengan Chariri (2012) dan Farook dan Lanis (2005) namun hasil pengujian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Khoiruddin (2013) yang menyatakan bahwa ukuran dewan pengawas syariah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan *islamic social reporting*.